

**PERMASALAHAN KEBIJAKAN NASIONAL PENGIRIMAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BERASPEK
HUBUNGAN ANTARNEGARA: KASUS DENGAN MALAYSIA**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial



BUNGA AULIA NURHIKMAH

1151004015

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BAKRIE
JAKARTA
2019**

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Bunga Aulia Nurhikmah

NIM : 1151004015

Tanda Tangan : 

Tanggal : 15 Agustus 2019

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, izin dan segala nikmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Permasalahan Kebijakan Nasional Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Yang Beraspek Hubungan Antarnegara: Kasus Dengan Malaysia”. Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Internasional pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie. Penulis menyadari bahwa, tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tugas Akhir ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya.

Dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dalam bentuk moril maupun materil, serta pemberian semangat dan doa yang membangun menjadi motivasi yang tinggi dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. terselesaikannya laporan ini juga, tidak terlepas dari adanya kontribusi serta peran dan bantuan dari pihak-pihak lain yang mendukung segala keperluan penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak Terima Kasih kepada pihak-pihak yang membantu, diantaranya:

1. Kedua Orang Tua penulis, atas segala dukungan yang tidak pernah henti dalam memberikan doanya demi kelancaran dan kesuksesan penulis, serta nasihat, didikan, semangat, bantuan baik secara moril maupun materil, tulisan ini juga penulis persembahkan khususnya untuk Ibunda tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan kekuatan hingga penulis dapat menempuh pendidikan S1,
2. Ibu Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Bakrie yang telah berhasil mengembangkan universitas ini menjadi lembaga yang berwibawa,
3. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie,

4. Bapak Muhammad Tri Andhika Kurniawan, S.Sos, M.A., Ketua Program dan Dosen Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.
5. Bapak Muhammad Badaruddin, S.Sos., M.Sc., M.A., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, nasihat-nasihat selama penulis menempuh pendidikan S1.
6. Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan nasihat serta saran, dan memotivasi penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini,
7. Bapak Bani Pamungkas, S.H, M.Si., M.P.A, selaku Dosen Penguji Pertama Tugas Akhir yang membantu memberikan arahan serta saran kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini,
8. Ibu Astrid Meilasari Sugiana, S.S, M.Sc, Ph.D, selaku Dosen Penguji Kedua Tugas Akhir yang membantu memberikan saran serta arahan kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini,
9. Segenap dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan nasihat-nasihat selama penulis menempuh pendidikan S1.
10. Mba Arin Septiarin beserta seluruh staf Biro Administrasi Akademik Universitas Bakrie, yang telah membantu segala keperluan pelayanan akademik penulis, memberikan saran dan nasihat-nasihat selama penulis menempuh pendidikan S1.
11. Bapak Duta Besar Mayerfas, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri yang telah membantu mengarahkan penulis ke bagian yang tepat di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai informan kunci,
12. Bapak Judha Nugraha, Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia yang telah membantu memberikan informasi-informasi yang penting dan sangat berguna dalam penulisan,
13. Bapak Duta Besar Tatang B. Razak, selaku Sekretaris Utama BNP2TKI yang sangat membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

14. Bapak Danny Ariana, selaku Jabatan Fungsional Tertentu Direktorat Jenderal Imigrasi yang telah memberikan nasihat serta saran dalam penyusunan tugas akhir,
15. Bapak Ibnu Ismoyo, Bapak Atang, Ibu Yani, Ibu Dosma, Bapak Ichsan kesemuanya dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang telah memberikan informasi dan saran ketika Magang (*Internship*),
16. Bapak Begi Hersutanto, SH, MA., mantan Staf Ahli di DPR-RI yang telah membantu penulis,
17. Bapak Dave Laksono, selaku Anggota Komisi I DPR-RI Fraksi Partai Golkar yang telah membantu penulis melalui email,
18. Ibu Rara Pertiwi, Sekretariat *Migrant Care* yang telah memberikan informasi-informasi yang sangat membantu dan memberikan pencerahan,
19. Mr. Abdil Bar, Sekretaris Kedua Kedutaan Besar Malaysia yang telah menjelaskan dengan detail masalah hubungan Malaysia-RI dengan rinci.
20. Teman-teman Ilmu Politik 2015 yang telah memberikan kesan dan pesan sejak awal perkuliahan hingga selesai,
21. Sahabat-sahabat seperjuangan Ihsan, Gilang, Arinta, Hikmah, Jani, Arum, Dai, yang selalu setia membantu, memberikan dukungan, canda-tawa, dan semangat selama perkuliahan,
22. Vinka, Indah, Axel yang telah memberikan dukungan, canda-tawa selama perkuliahan,
23. Carmella Calista dan Inayah Nurul Izza selaku adik penulis yang selalu mendukung penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
24. Opa Johan Pakpahan (Alm) dan Oma Lulu Taha Bachmid (Almh) yang selalu memberikan nasihat, kasih sayang, bantuan baik secara moril maupun materil,
25. Abdul Haris Jotolembah, SH, M.Si, selaku Orang tua sambung penulis yang selalu memberikan dukungan, nasihat, dan bantuan baik secara moril maupun materil,
26. Keluarga Besar penulis yang selalu mendukung dalam berbagai hal.
27. Dan masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Kemudian, terakhir penulis merasa beruntung mendapatkan kesempatan untuk studi di lembaga yang mendapatkan Akreditasi “A” dari BAN-PT.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan mudah-mudahan tulisan ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 15 Agustus 2019

Bunga Aulia Nurhikmah

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bakrie, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Aulia Nurhikmah
NIM : 1151004015
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bakrie **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERMASALAHAN KEBIJAKAN NASIONAL PENGIRIMAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA YANG BERASPEK HUBUNGAN
ANTARNEGARA: KASUS DENGAN MALAYSIA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Bakrie berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta untuk kepentingan akademis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Agustus 2019

Yang Menyatakan



(Bunga Aulia Nurhikmah)

**PERMASALAHAN KEBIJAKAN NASIONAL PENGIRIMAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA YANG BERASPEK HUBUNGAN
ANTARNEGARA: KASUS DENGAN MALAYSIA**

Bunga Aulia Nurhikmah

ABSTRAK

Minimnya tingkat lapangan kerja di Indonesia membuat masyarakat Indonesia harus beradu nasibnya dengan melakukan migrasi ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan upah lebih besar. Namun jumlah pekerja migran yang besar ini tentunya akan semakin meningkatkan probabilitas akan terjadinya permasalahan di tempat mereka bekerja, dalam hal ini yaitu Malaysia yang mempunyai sistem budaya, sistem sosial, sistem politik pemerintahan dan terutama dalam sistem hukumnya sangat berbeda. Konstataasi bahwa permasalahan PMI ini sudah terjadi, karena permasalahannya sudah ada sejak di tanah air. Bermula sejak di Indonesia sudah terlihat adanya penanganan persiapan sampai pengiriman PMI ini yang tidak berada di dalam gerak kebersamaan yang optimal. Dimana lemahnya koordinasi Birokrasi Indonesia yang disebabkan dengan masalah “ego sektoral” dari K/L yang terlibat.

Sebagai hasilnya penanganan masalah PMI menjadi tidak terlalu fokus, kesemua unsur kesamaan budaya, kesamaan rumpun dan kesamaan agama dari golongan mayoritas, tersebut dapat dijadikan bahan bagi “soft power” dan bahan untuk penyelenggaraan diplomasi publik di antara kedua negara untuk bisa membuat kasus-kasus tertentu tidak mencuat secara liar. Berdasarkan adagium yang populer bahwa kebijakan luar negeri (dalam hal ini masalah pengiriman PMI) itu bermula atau beranjak dari dalam negeri maka sesungguhnya sudah dapat diperkirakan bahwa koordinasi di dalam negeri secara pasti akan menghasilkan kualitas PMI yang kompeten. Dengan demikian tugas “front liners” di luar negeri yang dikomandoi oleh jajaran Kementerian Luar Negeri akan relatif lebih mudah dalam mengoptimasi pelayanan dan perlindungan terhadap PMI sebagai warga negara yang berkehormatan di luar negeri, Sebagai akibat dari hal ini, maka hubungan bilateral antara dua negara itu makin harmonis dan jauh dari sumber-sumber konflik yang ada.

Berdasarkan aspek-aspek inilah yang dijadikan tolok ukur dan fokus penelitian guna melihat benarkah permasalahan pekerja migran Indonesia dalam kasus dengan Malaysia akan secara optimal teratasi apabila adanya koordinasi dari unsur-unsur *Intermestik*. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian kualitatif dengan studi literatur atau pustaka, jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi, makalah hingga wawancara “in depth”.

Kata Kunci; PMI, Koordinasi K/L, Kebijakan Luar Negeri, Intermestik, Diplomasi

**THE PROBLEM OF NATIONAL POLICY IN DELIVERING OF
INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN RELATIONSHIPS BETWEEN
STATES: MALAYSIAN CASE**

Bunga Aulia Nurhikmah

ABSTRACT

The low level of employment in Indonesia has made Indonesian people have to compete with working abroad to get jobs with the expectation of higher wages. However, the large number of migrant workers will increase the probability of mis-manner in their working place in Malaysia. Malaysia has a cultural-, social-, and political systems; especially in its legal system. The problem began and occurred, since their domestic country. Starting in Indonesia, it has been seen that preparations is likely insufficient, began since preparations, selection, recruitment, training, documenting, and sending them to the host country is not in accordance to the optimum agreement between both countries. In this case Indonesian bureaucracy is involved with the problem of the so-called "sectoral ego" of the concerned K/L.

"Softpower" and "public diplomacy" between the two countries supposedly could be able to solve the blazing cases. Based on the common adagium that "foreign policy begins at home" (in this case: the PMI), the core problem is laid on the Indonesian side. In other words it starts from domestic side in preparing and making competent workers. Thus the task of the "front liners" abroad which is in command of the Ministry of Foreign Affairs will be relatively easier in optimizing and protecting the PMI as honour citizens abroad. As the result of this condition will make the relations between both countries more harmonious.

Based on those aspects as shown above there are some benchmarks in analyzing the problem of the PMI should be optimized if there is coordination between the intermestic elements. The research methodology used in this research is qualitative which completed by literature, scientific journals, books, official documents, papers and in depth interview of the respected informants.

Keywords; PMI, K/L coordination, foreign policy, intermestic, diplomacy.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
UNGKAPAN TERIMA KASIH.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR DIAGRAM	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
GLOSARIUM.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	10
1.3 Batasan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Signifikasi Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.6.2 Manfaat Praktis.....	11
1.7 Sistematika.....	12
BAB II.....	14

KERANGKA TEORI YANG DIHARAPKAN MAMPU MEMECAHKAN PERMASALAHAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA: DI MALAYSIA	14
2.1 Paradigma Teoritik	14
2.1.1 Realisme	14
2.2 Konsep Teori	21
2.2.1 Intermestik	21
2.2.2 <i>Soft Power</i>	24
2.2.3 Diplomasi Publik	25
2.3 Alur Kerangka Berpikir Sistemik dan Hipotesis Kerja	28
2.3.1 Alur Kerangka Berpikir Sistemik	28
2.3.2 Hipotesis Kerja	30
BAB III	31
METODE YANG LAYAK DALAM MENDEKATI HUBUNGAN INTERMESTIK DALAM MASALAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA: KHUSUSNYA DI MALAYSIA	31
3.1 Metode Penelitian	31
3.2 Jenis Penelitian	34
3.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
3.3.1 Sumber Data	36
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	37
3.3.3 Teknik Analisis Data	44
BAB IV	46
TEMUAN PENELITIAN LAPANGAN DAN ANALISIS HUBUNGAN INTERMESTIK DALAM MASALAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA	46

4.1 Koordinasi Domestik Antar K/L dan <i>Stakeholders</i> Dalam Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	46
4.1.1 Peranan K/L Terkait dan <i>Stakeholders</i>	47
A. Kementerian Ketenagakerjaan	47
B. BNP2TKI	52
C. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	53
D. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yang Merupakan Penjuru Dalam Pemrosesan Penerbitan	54
E. Lembaga Swadaya Masyarakat (Migrant Care).....	59
4.2 Faktor Koordinasi Internasional Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	65
A. Kementerian Ketenagakerjaa.....	65
4.2.1 Bentuk Penanganan Kasus Oleh Kementerian Luar Negeri dan K/L Terkait.....	66
4.2.1.1 Kasus Siti Aisyah dan Adelina Sebagai "blazing case".....	66
4.3 ANALISIS	80
BAB V	83
PENUTUP.....	83
5.1 Simpulan.....	83
5.2 Saran.....	85
5.2.1 Saran Akademik	85
5.2.2 Saran Praktis.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
Lampiran 1 "Field Notes" Wawancara.....	91
A. Kementerian Luar Negeri.....	92
B. BNP2TKI	102
C. Kemenkumham (Ditjen Imigrasi)	112

D. DPR RI (Komisi I dan Komisi IX)	130
E. Migrant Care.....	140
F. Embassy of Malaysia in Jakarta.....	146
Lampiran 2 Kasus Siti Aisyah dan Adelina.....	156
Lampiran 3 UU Nomor 18 Tahun 2017.....	159
Lampiran 4 Dokumen-Dokumen	169
Lampiran 5 Kasus Hukuman Mati dan PMI	175
Lampiran 6 Hasil Survey PRT Migran Pasca Moratorium.....	176
Lampiran 7 Bukti Chat Menghubungi PMI (<i>Returnee</i>)	177

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Berpikir Penelitian	28
--	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perspektif Realisme	20
Tabel 3.1 Proses Menjawab Pertanyaan Penelitian	34
Tabel 3.2 Operasionalisasi Konsep	35
Tabel 3.3 Data Informan	38
Tabel 3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
Tabel 4.1 Jumlah Penempatan PMI Berdasarkan 5 (lima) Negara Penempatan Tertinggi Periode Tahun 2014 – Maret 2018....	49
Tabel 4.2 Jumlah Penempatan PMI Berdasarkan Jenis Kelamin Periode Tahun 2014 – Maret 2018.....	50
Tabel 4.3 Jumlah Penempatan PMI Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode Tahun 2014 – Maret 2018	51
Tabel 4.4 Jumlah Penempatan PMI Berdasarkan 10 (sepuluh) Jabatan Tertinggi Periode Tahun 2014 – Maret 2018.....	52
Tabel 4.5 Perjanjian Kerja Sama Tentang Pencegahan dan Penanganan PMI Non-Prosedural Ke Luar Negeri.....	55
Table 4.6 Tugas dan Fungsi Dari Masing-Masing K/L Menurut Perundang- undangan Yang Ada	60
Tabel 4.7 Presentase Penanganan Kasus WNI di Seluruh Dunia	67
Table 4.8 Presentase Hasil Kasus WNI Yang Terancam Hukuman Mati	68
Tabel 4.9 Adanya “Ego Sektoral” dari K/L dan pendapat Lembaga Negara (DPR-RI), LSM, PMI (<i>Returnee</i>) dan Kedutaan Malaysia di RI	71
Tabel 4.10 Konstatasi Tingkat Koordinasi dari K/L dan pendapat Lembaga Negara (DPR-RI), LSM, dan Kedutaan Malaysia di RI	73
Tabel 4.11 Konstatasi Dugaan Kurang Optimalnya Birokrasi dari K/L dan pendapat Lembaga Negara (DPR-RI), LSM, dan Kedutaan Malaysia di RI	75
Tabel 4.12 Konstatasi Dugaan Kurangnya Tata Kelola Yang Baik dari K/L dan pendapat Lembaga Negara (DPR-RI), LSM, dan Kedutaan Malaysia di RI	76

Tabel 4.13 Konstatasi Rendahnya Monitoring Evaluasi dari K/L dan pendapat Lembaga Negara (DPR-RI), LSM, dan Kedutaan Malaysia di RI	78
Tabel 4.14 Konstatasi Kurangnya Pelatihan Kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dari K/L dan pendapat Lembaga Negara (DPR-RI), LSM, dan Kedutaan Malaysia di RI	79

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu	7
Diagram 3.1 Alur Sistemik Penelitian	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 “Field Notes” Wawancara.....	91
A. Kementerian Luar Negeri.....	92
B. BNP2TKI	102
C. Kemenkumham (Ditjen Imigrasi)	112
D. DPR RI (Komisi I dan Komisi IX).....	130
E. Migrant Care.....	140
F. Embassy of Malaysia in Jakarta.....	146
Lampiran 2 Kasus Siti Aisyah dan Adelina.....	156
Lampiran 3 UU Nomor 18 Tahun 2017.....	159
Lampiran 4 Dokumen-Dokumen	169
Lampiran 5 Kasus Hukuman Mati dan PMI	171
Lampiran 6 Hasil Survey PRT Migran Pasca Moratorium.....	172
Lampiran 7 Bukti Chat Menghubungi PMI (<i>Returns</i>)	173

GLOSARIUM

ABK	: Anak Buah Kapal
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BHI	: Badan Hukum Indonesia
BIN	: Badan Intelijen Negara
BLK	: Balai Latihan Kerja
BNP2TKI	: Badan Nasional dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
CPMI	: Calon Pekerja Migran Indonesia
DESBUMI	: Desa Buruh Migran
DESMIGRATIF	: Desa Migran Produktif
DITJEN	: Direktorat Jenderal
DUBES	: Duta Besar
DUKCAPIL	: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
<i>G to G</i>	: <i>Government to Government</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HI	: Hubungan Internasional
<i>HPC</i>	: <i>Hard Profile Case</i>
INTERMESTIK	: Internasional-Domestik
<i>INTERMESTIC</i>	: <i>International-Domestic</i>
<i>JCBC</i>	: <i>Joint Commission For Bilateral Cooperation</i>
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KEDUBES	: Kedutaan Besar
KEMENKUMHAM	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KEMENAKER	: Kementerian Ketenagakerjaan
KEMLU	: Kementerian Luar Negeri
KJRI	: Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KK	: Kartu Keluarga
KK	: Kontrak Kerja
K/L	: Kementerian/Lembaga

KONJEN	: Konsulat Jenderal
KPW	: Koordinator Perlindungan Warga
KTKLN	: Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KP	: Keputusan Presiden
LPC	: <i>Low Profile Case</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
N/A	: <i>Not Available</i>
NGO	: <i>Non-Government Organization</i>
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PERMEN	: Peraturan Menteri
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PLRT	: Penata Laksana Rumah Tangga
PM	: <i>Prime Minister</i>
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPTKIS	: Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
PRT	: Pembantu Rumah Tangga
RAKER	: Rapat Kerja
RDP	: Rapat Dengar Pendapat
PT	: Perseroan Terbatas
RI	: Republik Indonesia
SARKES	: Sarana Kesehatan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEKJEN	: Sekretaris Jenderal
SIMKIM	: Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
SISKOTKLN	: Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama

SPLP	: Surat Perjalanan Laksana Paspor
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TPI	: Tempat Pemeriksaan Imigrasi
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
TUSI	: Tugas dan Fungsi
TUPOKSI	: Tugas Pokok dan Fungsi
UU	: Undang-Undang
WA	: <i>WhatsApp</i>
WNA	: Warga Negara Asing